

**LAPORAN PENELITIAN DOSEN
PROGRAM STUDI**



**KERAGAAN DINAMIKA KEMISKINAN WILAYAH PESISIR
UTARA SELATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh :

Dr. Ir. Totok Hendarto, M.Si (0025016701)

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PERIKANAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Keragaan Dinamika kemiskinan Wilayah Pesisir
Utara Selatan Provinsi Jawa Timur
 2. Pelaksana
 - a. Nama Lengkap Dr. Ir., Totok Hendarto, MSi
 - b. Jenis Kelamin Laki-laki
 - c. NIDN 0025016701
 - d. Pangkat?Golongan Pembina / IV a
 - e. Jabatan Fungsional Lektor Kepala
 - f. Alamat Kantor Jl. Semolowaru No 84 Surabaya
 - g. Telep/Faks/Alamat Surel 031-5941969 / 085691067047
thunitomo@yahoo.co.id
 3. Lokasi Pengabdian Masyarakat : Jawa Timur
 4. Jangka Waktu Penngabdian masyarakat : 2 bulan
 5. Biaya Pengabdian : Dua Puluh Lima Juta Rupiah
 - a. Mandiri : Rp. 25.000.000,-
 - b. Sumber lain : -
- Mengetahui : Surabaya, 1 Juli 2019
Dekan Fakultas Pertanian Pelaksana,

Ir. A. KUSYAIRI, M.Si
NPP. 90.01.1.074

Dr. Ir., TOTOK HENDARTO, MSi
NIP. 19670125 199203 1 003

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Dr. Soetomo

(Dr. SRI UTAMI ADY, SE. MM.)
NPP : 94.01.1.170

RINGKASAN

Judul penelitian adalah Keragaan Dinamika kemiskinan Wilayah Pesisir Utara Selatan Provinsi Jawa Timur. Indonesia bersama Negara-negara di dunia, telah menyepakati sebuah resolusi yang dicetuskan dalam Agenda for Sustainable Development tahun 2030, diselenggarakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk pengurangan kemiskinan, kelaparan, perbaikan pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan, yang dijabarkan secara praktis dalam Sustainable Development Goals (SDG's).

Permasalahan penelitian adalah Seberapa besar penetapan garis kemiskinan, seberapa besar jumlah dan prosentase penduduk miskin, bagaimana keragaan jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Pantai Utara dan Selatan, dan bagaimana keragaan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan perkembangan indeks keparahan kemiskinan di wilayah pesisir Pantai Utara dan Selatan Provinsi Jawa Timur ?.

Metode penelitian yang digunakan Statistik deskriptif, Pengumpulan data berdasarkan karakteristik penelusuran data sekunder yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan : 1. Penetapan garis kemiskinan perkotaan di Jawa Timur lebih rendah dari garis kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa, untuk pedesaan di Jawa Timur lebih tinggi dari garis kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa, 2. Jumlah dan prosentase penduduk miskin perkotaan di Jawa Timur lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin perkotaan rata-rata di Pulau Jawa, begitu juga dengan pedesaan. 3. Keragaan jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) lebih rendah dari pada di wilayah pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur, 4. Keragaan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan bersifat fluktuatif, pada tahun 2012 wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) lebih tinggi dari pada wilayah pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur, tahun 2015 wilayah pantai Utara (Pantura) Jawa Timur lebih rendah dan pada tahun 2018 lebih tinggi kembali, 5. Keragaan perkembangan indeks keparahan kemiskinan juga bersifat fluktuatif, pada tahun 2012 wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) lebih tinggi dari pada wilayah pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur, tahun 2015 wilayah pantai Utara (Pantura) Jawa Timur lebih rendah dan pada tahun 2018 lebih tinggi kembali.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Lingkup Penelitian	2
1.3 Perumusan Masalah	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB 3 METODE PENELITIAN	6
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	7
BAB 5 KESIMPULAN	29
REFERENSI	30

DAFTAR TABEL

TABEL		Hal
1	Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Perkotaan di Pulau Jawa.....	7
2	Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Pedesaan di Pulau Jawa	9
3	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribuan Jiwa) Perkotaan di Pulau Jawa	11
4	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribuan Jiwa) Pedesaan di Pulau Jawa	13
5	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribuan Jiwa) Total (Perkotaan + Pedesaan) di Pulau Jawa	15
6	Prosentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (%) Perkotaan di Pulau Jawa	17
7	Prosentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (%) Pedesaan di Pulau Jawa	19
8	Prosentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (%) Total (Perkotaan + Pedesaan) di Pulau Jawa	21
9	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan jiwa) di Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) Pulau Jawa	23
10	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan jiwa) di Wilayah Pantai Selatan Jawa (Pansela) di Pulau Jawa	24
11	Pekembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) di Pulau Jawa	25
12	Pekembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Wilayah Pantai Selatan Jawa (Pansela) di Pulau Jawa	26
13	Pekembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) di Pulau Jawa	27
14	Pekembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Wilayah Pantai Selatan Jawa (Pansela) di Pulau Jawa	28

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia bersama dengan Negara-negara di dunia, tidak kurang dari 193 negara lain telah menyepakati sebuah resolusi yang dicetuskan dalam *Agenda for Sustainable Development* tahun 2030, diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk pengurangan kemiskinan, kelaparan, perbaikan pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan, yang dijabarkan secara praktis dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's). Semangat *Sustainable Development Goals* (SDG's) sangat berguna untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Secara nasional, penanggulangan kemiskinan menghadapi *triple-track problem*, yaitu kemiskinan yang meskipun terus menurun secara relatif, tetapi secara nominal meningkat. Kedua, kerentanan kemiskinan, yaitu banyaknya penduduk miskin di sekitar Garis Kemiskinan (GK) yang mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada di atas GK jatuh ke bawah GK. Ketiga, kesenjangan baik antar wilayah provinsi dan kabupaten kota maupun kesenjangan pendapatan atau konsumsi antar penduduk secara keseluruhan dan antar penduduk miskin (indeks keparahan kemiskinan). Dengan tantangan tersebut, penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan akselerasinya.

Sektor pertanian secara luas menyangkut bidang kehutanan, perikanan, peternakan merupakan salah satu sector yang dirasa penting untuk segera di tanggulasi tingkat kemiskinannya dengan berbagai upayah terseruktur meliputi bantuan pangan, bantuan pembiayaan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan berbagai sektor yang menyangkut erat dengan lapangan pekerjaan keluarga miskin [1].

Di Indonesia, sebaran kemiskinan tidak selalu merata, tidak kurang 55,33% berada dari di Pulau Jawa. Terbesar kedua adalah di pulau Sumatera mencapai 21,60%, Pulau Sulawesi mencapai 7,15 %, Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara sebesar 6,90%. Untuk Maluku dan Papua mencapai 5,69% serta Pulau Kalimantan sebesar 3,26%.

Mencari solusi untuk pengentasan kemiskinan tidak lah mudah karena akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bersifat multidimensional. Salah satu perdebatan mendasar adalah bagaimana cara mengukur tingkat kemiskinan itu sendiri. Jika pengukuran kemiskinan di dasarkan atas kebutuhan pengeluaran dan ketidak mampuan dari sisi ekonomi maka muncullah konsep kemiskinan absolut dan kemiskinan relative [2].

Pedesaan merupakan kantong penduduk miskin dengan jumlah yang relative lebih besar dari penduduk miskin yang tinggal di kota. Penduduk miskin kota seringkali berasal dari penduduk desa yang bermigrasi ke kota, dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik [3].

Peningkatan kapasitas manusia (human capital development) dalam bentuk peningkatan jenjang pendidikan, pendampingan dan pelatihan wirausaha mandiri serta pengadaan dan penguatan infrastruktur juga akan lebih efektif untuk menanggulangi kemiskinan [4].

1.2 Lingkup Kegiatan Penelitian

Ruang lingkup penelitian menganalisis keragaan dinamika kemiskinan wilayah pesisir Utara selatan Provinsi Jawa Timur. Yang berkaitan dengan penetapan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, prosentase penduduk miskin, perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan perkembangan indeks keparahan kemiskinan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar penetapan garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ?
2. Seberapa besar jumlah dan prosentase penduduk miskin Di Provinsi Jawa Timur ?
3. Bagaimana keragaan jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Pantai Utara dan Selatan Jawa Timur ?
4. Bagaimana keragaan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan perkembangan indeks keparahan kemiskinan di wilayah pesisir Pantai Utara dan Selatan Provinsi Jawa Timur ?

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada tahun 2015 di Indonesia, penduduk miskin mencapai 28,51 juta jiwa atau 11,31%. Penduduk miskin yang tinggal di pedesaan mencapai 17,89 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan 14,09%, yang tinggal diperkotaan mencapai 10,62 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan 8,22%. Secara umum wilayah desa jauh lebih tinggi dibandingkan di kota dalam hal banyaknya penduduk miskin, angka kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayah pembangunan pedesaan masih perlu terus dilakukan dengan memperkuat sosial ekonomi dan infrastruktur khususnya pedesaan di wilayah pesisir [1].

Definisi kemiskinan seringkali diidentifikasi beragam oleh para ahli diantaranya adalah : kriteria Badan Pusat Statistik, Bank Dunia, Asian Development Bank, serta perhitungan indeks FGT yaitu Headcount Index, Poverty Gap Index, dan Poverty Severity Index. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar USD 2 per kapita/hari. Rumah tangga akan digolongkan miskin jika pendapatan per kapita/harinya kurang dari ketentuan tersebut diatas. Garis kemiskinan sebesar USD 1,25 per kapita/hari disampaikan oleh Asian Development Bank. Rumah tangga dengan pendapatan per kapita/bulan kurang dari ketentuan BPS tentang Garis kemiskinan yang dipakai pada saat itu, dimasukkan dalam golongan miskin. Beberapa ahli mempergunakan Headcount Index, Poverty Gap Index dan Poverty Severity Index sebagai ketentuan tingkat kemiskinan rumah tangga [5].

Hasil penelitian Maulana Firdaus, Tenny Apriliani dan Rizki Aprilian Wijaya. 2013 menyatakan bahwa rumah tangga nelayan dinyatakan miskin jika proporsi pengeluaran rumah tangga terbesar untuk pengeluaran pangan mencapai 72,88 persen diantaranya jenis pangan padi-padian mencapai 22,24 persen dan tembakau (rokok) yang mencapai 18,75 persen dan untuk pengeluaran non pangan sebesar 27,12 persen. Sumber pendapatan rumah tangga nelayan bisa diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi terbatas di sektor perikanan dan non perikanan. Sektor perikanan seringkali berprofesi sebagai nelayan dan pedagang perikanan, Sedangkan pedagang seringkali ditambatkan untuk pelaku ekonomi non perikanan. Nelayan merupakan jenis mata pencaharian di masyarakat yang memberikan pengaruh sebesar 96 persen terhadap total pendapatan rumah tangga. Untuk profesi pedagang perikanan dan pedagang menyumbangkan pengaruhnya sebesar 3 persen dan 1 persen saja. Pendapatan dalam

rumah tangga bersumber dari kepala keluarga mencapai 89 persen, istri berkontribusi 3 persen, anak sebesar 3 persen dan anggota rumah tangga lainnya seperti menantu memberikan kontribusi 5 persen terhadap total pendapatan rumah tangga [6].

Sifat dari kemiskinan sangatlah dinamis, khususnya yang berada di sekitar garis kemiskinan, meliputi mereka-mereka yang berada di bawah sedikit garis kemiskinan dan mereka-mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan salah satu ukuran yang sangat praktis dalam menentukan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Apakah suatu anggota penduduk bisa di sebut miskin atau tidak diperlukan pemahaman tentang garis kemiskinan sebagai determinasi atau penentunya.

Golongan masyarakat yang bersifat the Last, the Least, the Lowest, and the Loss seringkali di kenal dengan sebutan kemiskinan kronis. Golongan masyarakat yang seperti ini merupakan golongan yang terakhir memperoleh kesempatan, paling sedikit menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Golongan masyarakat ini juga biasanya paling rendah derajat kehidupan di masyarakat dan selalu kehilangan arah untuk menentukan pilihannya.

Penghitungan Garis Kemiskinan (GK) dilakukan dengan cara menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan hingga level provinsi. GKM dihitung berdasarkan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disamakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari menggunakan 52 jenis komoditas makanan. Untuk GKNM dihitung berdasarkan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diukur dari 51 jenis komoditi di wilayah perkotaan dan 47 jenis komoditi di wilayah perdesaan.

Pendekatan dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar merupakan cara mengukur tingkat kemiskinan yang di ungkapkan oleh Badan Pusat Statistik. Kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan seseorang atau kelompok masyarakat dari sisi ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dari makanan dan bukan makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran. Sehingga nantinya dapat dihitung prosentasi penduduk miskin (P0). Seberapa besar perubahan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di nyatakan sebagai Indeks Kedalaman Kemiskinan

(P1), sedangkan seberapa besar variasi atau beragamnya rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin dinyatakan sebagai Keparahan Kemiskinan (P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index (P2) adalah ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tersebut [7].

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan

Data statistik dapat dikumpulkan dengan menggunakan prosedur yang sistematis. Pengumpulan data berdasarkan karakteristik penelusuran data sekunder, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada [8].

Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat [9].

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Garis Kemiskinan Menurut Provinsi, Tahun 2007-2019

Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Perkotaan di Pulau Jawa

Provonsi	Perkotaan													Jml	Rata2
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
DKI JAKARTA	434322	459560	503038	520690	578247	607778	-	-	-	-	-	-	-	3103635	238741.15
JAWA BARAT	281189	294700	318297	332145	354866	372260	240945	277645	305618	324937	341682	364151	376860	4185295	321945.77
JAWA TENGAH	268397	286014	308163	322799	339692	359526	235202	267991	296864	319188	331673	348206	365607	4049322	311486.31
YOGYAKARTA	317925	333561	359470	370510	413631	432018	256558	286137	312249	331308	348061	366256	378873	4506557	346658.23
JAWA TIMUR	278653	293391	314320	329241	372585	399334	250530	278429	305404	323779	339537	361493	382327	4229023	325309.46
BANTEN	300109	324902	365672	382903	421137	468572	242331	281925	318497	347765	363588	390309	412007	4619717	355362.85
Jumlah	1880595	1992128	2168960	2258288	2480158	2639488	1225566	1392127	1538632	1646977	1724541	1830415	1915674		
Rata - rata	313432.50	332021.33	361493.33	376381.33	413359.67	439914.67	204261.00	232021.17	256438.67	274496.17	287423.50	305069.17	319279.00		

Pada tabel 1 terlihat bahwa garis kemiskinan Perkotaan di Jawa Timur pada tahun 2007 sebesar (Rp. 278.653/kapita/bulan) lebih rendah dari garis kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa (Rp. 313.432,50/kapita/bulan). Garis kemiskinan di Jawa Timur juga lebih rendah dari garis kemiskinan DKI Jakarta (Rp. 434322/kapita/bulan), Provinsi Jawa Barat (Rp. 281189/kapita/bulan), DI Yogyakarta (Rp. 317925/kapita/bulan), dan Provinsi Banten (Rp. 300109/kapita/bulan). Akan tetapi garis kemiskinan Perkotaan di Jawa Timur pada tahun 2007 masih lebih besar dari garis kemiskinan Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah (Rp268397/kapita/bulan).

Pada tahun 2019 atau dua belas tahun kemudian, garis kemiskinan Perkotaan di Jawa Timur pada tahun 2007 sebesar (Rp. 382327/kapita/bulan) lebih tinggi dari garis kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa (Rp. 319279/kapita/bulan) . Garis kemiskinan di Jawa Timur juga lebih rendah dari garis kemiskinan dan Provinsi Banten (Rp. 412007/kapita/bulan). Akan tetapi garis kemiskinan Perkotaan di Jawa Timur pada tahun 2019 masih lebih besar dari garis kemiskinan Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah (Rp365607/kapita/bulan), Provinsi Jawa Barat (Rp. 376860/kapita/bulan) dan DI Yogyakarta (Rp. 378873/kapita/bulan),

Tabel 2. Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Pedesaan di Pulau Jawa

Provinsi	Pedesaan													Jml	Rata2
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAWA BARAT	240945	268251	277645	285076	305618	319228	324937	331237	341682	353103	364151	367805	376860	4156538	319733.69
JAWA TENGAH	235202	256368	267991	277802	296864	310295	319188	322489	331673	337657	348206	355306	365607	4024648	309588.31
YOGYAKARTA	256558	275786	286137	296429	312249	324386	331308	337230	348061	352861	366256	369606	378873	4235740	325826.15
JAWA TIMUR	250530	269294	278429	286798	305404	318443	323779	328846	339537	347997	361493	368793	382327	4161670	320128.46
BANTEN	242331	264632	281925	296241	318497	336592	347765	351708	363588	373039	390309	405965	412007	4384599	337276.85
Jumlah	1225566	1334331	1392127	1442346	1538632	1608944	1646977	1671510	1724541	1764657	1830415	1867475	1915674		
Rata - rata	245113.2	266866.2	278425.4	288469.2	307726.4	321788.8	329395.4	334302	344908.2	352931.4	366083	373495	383134.8		

Pada tabel 2 terlihat bahwa garis kemiskinan Pedesaan di Jawa Timur pada tahun 2007 sebesar (Rp. 250530/kapita/bulan) lebih tinggi dari garis kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa (Rp. 245113,20/kapita/bulan) . Garis kemiskinan di Jawa Timur juga lebih tinggi dari garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Rp. 240945/kapita/bulan), Provinsi Banten (Rp. 242331/kapita/bulan) dan Provinsi Jawa Tengah (Rp. 242331/kapita/bulan). Akan tetapi garis kemiskinan Pedesaan di Jawa Timur pada tahun 2007 masih lebih rendah dari garis kemiskinan Pedesaan di DI Yogyakarta (Rp. 256558/kapita/bulan).

Pada tahun 2019 atau dua belas tahun kemudian, garis kemiskinan Pedesaan di Jawa Timur sebesar (Rp. 382327/kapita/bulan) lebih rendah dari garis kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa (Rp. 383134.8/kapita/bulan) . Begitu juga dengan garis kemiskinan Pedesaan di Jawa Timur lebih rendah dari garis kemiskinan Pedesaan di Provinsi Banten (Rp. 412007/kapita/bulan). Akan tetapi Garis kemiskinan di Pedesaan Jawa Timur juga lebih tinggi dari garis kemiskinan di Pedesaan Provinsi Jawa Barat (Rp. 376860/kapita/bulan), Provinsi Jawa Tengah (Rp 365607/kapita/bulan) dan dan DI Yogyakarta (Rp. 378873/kapita/bulan).

2. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Tahun 2007-2019

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribuan Jiwa) Perkotaan di Pulau Jawa

Provinsi	Perkotaan													Jml	Rata2
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
DKI JAKARTA	405.70	379.60	323.17	312.18	363.42	366.77	375.7	412.79	368.67	385.84	393.13	372.26	365.55	4824.78	371.14
JAWA BARAT	2654.60	2617.40	2531.37	2350.53	2654.69	2560.02	2626.16	2554.06	2706.52	2543.3	2391.23	2336.32	2268.75	32794.95	2522.69
JAWA TENGAH	2687.30	2556.50	2420.94	2258.94	2092.51	1946.51	1870.73	1771.53	1789.57	1879.55	1815.58	1709.56	1633.96	26433.18	2033.32
YOGYAKARTA	335.30	324.20	311.47	308.36	304.34	306.51	325.53	324.43	292.64	301.25	298.39	298.47	304.66	4035.55	310.43
JAWA TIMUR	2575.70	2310.60	2148.51	1873.55	1768.23	1605.96	1622.03	1531.89	1571.15	1552.77	1455.45	1458.09	1449.27	22923.20	1763.32
BANTEN	399.40	371.00	348.74	318.29	335.53	333.45	414.46	381.18	418.95	380.16	415.67	382.13	378.73	4877.69	375.21
Jumlah	9058.00	8559.30	8084.20	7421.85	7518.72	7119.22	7234.61	6975.88	7147.50	7042.87	6769.45	6556.83	6400.92		
Rata - rata	1509.67	1426.55	1347.37	1236.98	1253.12	1186.54	1205.77	1162.65	1191.25	1173.81	1128.24	1092.81	1066.82		
Indonesia	13559.3	12768.5	11910.53	11097.77	11046.75	10507.77	10634.47	10356.69	10619.86	10485.64	10272.55	10144.37	9994.8		

Pada tabel 3 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin Perkotaan di Jawa Timur pada tahun 2007 sebanyak (2.575.700 jiwa) lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin Perkotaan rata-rata di Pulau Jawa (1509.67 jiwa), Provinsi Banten (399.400 jiwa), DKI Jakarta (405.700 jiwa) dan DI Yogyakarta (335.300 jiwa), akan tetapi lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat (2.654.600 jiwa) dan Jawa Tengah (2.687.300 jiwa). Pada tahun 2019 atau dua belas tahun kemudian, jumlah penduduk miskin Perkotaan di Jawa Timur sebesar (1.449.270 jiwa) lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin Perkotaan rata-rata di Pulau Jawa (1.066.820 jiwa), Provinsi Banten (378.730 jiwa), DKI Jakarta (365.550 jiwa) dan DI Yogyakarta (304.660 jiwa), akan tetapi lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat (2.268.750 jiwa) dan Jawa Tengah (1.633.960 jiwa) .

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribuan Jiwa) Pedesaan di Pulau Jawa

Provinsi	Pedesaan													Jml	Rata2	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JAWA BARAT	2803.30	2705.00	2452.2	2423.19	1993.93	1861.46	1756.49	1684.9	1779.13	1624.81	1383.18	1203.08	1130.41	24801.08	1907.78	
JAWA TENGAH	3869.90	3633.10	3304.75	3110.22	3014.85	2916.9	2834.14	2790.29	2716.21	2614.2	2381.92	2157.86	2109.26	37453.60	2881.05	
YOGYAKARTA	298.20	292.10	274.31	268.94	256.55	255.6	209.66	208.15	192.91	187.58	167.94	151.78	143.81	2907.53	223.66	
JAWA TIMUR	4579.60	4340.60	3874.07	3655.76	3587.98	3354.58	3243.79	3216.53	3204.82	3085.76	2949.82	2834.05	2662.98	44590.34	3430.03	
BANTEN	486.80	445.70	439.33	439.87	354.96	314.8	268.25	268.01	271.71	277.58	284.16	286.6	275.73	4413.50	339.50	
Jumlah	12037.80	11416.50	10344.66	9897.98	9208.27	8703.34	8312.33	8167.88	8164.78	7789.93	7167.02	6633.37	6322.19			
Rata - rata	2407.56	2283.30	2068.93	1979.60	1841.65	1740.67	1662.47	1633.58	1632.96	1557.99	1433.40	1326.67	1264.44			
Indonesia	23609	22194.8	20619.44	19925.62	18972.18	18086.87	17919.46	17371.09	17893.71	17278.68	16310.44	15543.31	15149.92			

Pada tabel 4 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin Pedesaan di Jawa Timur pada tahun 2007 sebanyak (4.579.600 jiwa) lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin Pedesaan di Pulau Jawa (2.407.560 jiwa), Provinsi Banten (486.800 jiwa), DI Yogyakarta (298.200 jiwa), Provinsi Jawa Barat (2.803.300 jiwa) dan Jawa Tengah (3.869.900 jiwa). Pada tahun 2019 atau dua belas tahun kemudian, jumlah penduduk miskin Pedesaan di Jawa Timur sebanyak (2.662.980 jiwa) lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin Pedesaan rata-rata di Pulau Jawa (1.264.440 jiwa), Provinsi Banten (275.730 jiwa), DI Yogyakarta (143.810 jiwa), Provinsi Jawa Barat (1.130.410 jiwa) dan Jawa Tengah (2.109.260 jiwa).

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa) Total (Perkotaan + Pedesaan) di Pulau Jawa

Provinsi	Total													Jml	Rata2
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
DKI JAKARTA	405.70	379.60	323.17	312.18	363.42	366.77	375.7	412.79	368.67	385.84	393.13	372.26	365.55	4824.78	371.14
JAWA BARAT	5457.90	5322.40	4983.57	4773.72	4648.63	4421.48	4382.65	4238.96	4485.65	4168.11	3774.41	3539.4	3399.16	57596.04	4430.46
JAWA TENGAH	6557.20	6189.60	5725.69	5369.16	5107.36	4863.41	4704.87	4561.82	4505.78	4493.75	4197.49	3867.42	3743.23	63886.78	4914.37
YOGYAKARTA	633.50	616.30	585.78	577.3	560.88	562.11	535.18	532.59	485.56	488.83	466.33	450.25	448.47	6943.08	534.08
JAWA TIMUR	7155.30	6651.30	6022.59	5529.3	5356.21	4960.54	4865.82	4748.42	4775.97	4638.53	4405.27	4292.15	4112.25	67513.65	5193.36
BANTEN	886.20	816.70	788.07	758.16	690.49	648.25	682.71	649.19	690.67	657.74	699.83	668.74	654.46	9291.21	714.71
Jumlah	21095.80	19975.90	18428.87	17319.82	16726.99	15822.56	15546.93	15143.77	15312.30	14832.80	13936.46	13190.22	12723.12		
Rata - rata	3515.97	3329.32	3071.48	2886.64	2787.83	2637.09	2591.16	2523.96	2552.05	2472.13	2322.74	2198.37	2120.52		
Indonesia	37168.3	34963.3	32529.97	31023.39	30018.93	28594.64	28553.93	27727.78	28513.57	27764.32	26582.99	25674.58	25144.72		

Pada tabel 5 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin total (perkotaan dan pedesaan) di Jawa Timur pada tahun 2007 sebanyak (7.155.300 jiwa) lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin total (perkotaan dan pedesaan) rata-rata di Pulau Jawa (3.515.970 jiwa), Provinsi Banten (886.200 jiwa), DKI Jakarta (405.700 jiwa) dan DI Yogyakarta (633.500 jiwa), Provinsi Jawa Barat (5457.90 jiwa) dan Jawa Tengah (6557.200 jiwa). Pada tahun 2019 atau dua belas tahun kemudian, jumlah penduduk miskin total (perkotaan dan pedesaan) di Jawa Timur sebesar (4.112.250 jiwa) lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin Perkotaan rata-rata di Pulau Jawa (2120.520 jiwa), Provinsi Banten (654.460 jiwa), DKI Jakarta (365.550 jiwa) dan DI Yogyakarta (448.470 jiwa), Provinsi Jawa Barat (3399.160 jiwa) dan Jawa Tengah (3743.230 jiwa)

3. Prosentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Tahun 2007-2019

Tabel 6. Prosentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (%) Perkotaan di Pulau Jawa

Provinsi	Perkotaan													Jml	Rata2
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
DKI JAKARTA	4.61	4.29	3.62	3.48	3.75	3.70	3.72	4.09	3.61	3.75	3.78	3.55	3.47	49.42	3.80
JAWA BARAT	11.21	10.88	10.33	9.43	9.26	8.71	8.69	8.32	8.58	7.55	6.76	6.33	6.03	112.08	8.62
JAWA TENGAH	17.23	16.34	15.41	14.33	14.12	13.11	12.53	11.50	11.50	11.38	10.55	9.67	9.20	166.87	12.84
DI YOGYAKARTA	15.63	14.99	14.25	13.98	13.16	13.1	13.73	13.36	11.93	11.68	11.00	10.73	10.89	168.43	12.96
JAWA TIMUR	14.71	13.15	12.17	10.58	9.87	8.9	8.9	8.30	8.41	7.91	7.13	6.97	6.84	123.84	9.53
BANTEN	6.79	6.15	5.62	4.99	4.61	4.41	5.27	4.74	5.11	4.49	4.69	4.24	4.12	65.23	5.02
Jumlah	70.18	65.8	61.40	56.79	54.77	51.93	52.84	50.31	49.14	46.76	43.91	41.49	40.55		
Rata - rata	11.70	10.97	10.23	9.47	9.13	8.66	8.81	8.39	8.19	7.79	7.32	6.92	6.76		
Indonesia	12.52	11.65	10.72	9.87	9.23	8.78	8.39	8.29	7.79	7.72	7.02	6.89	6.69		

Pada tabel 6 terlihat bahwa prosentase penduduk miskin Perkotaan di Jawa Timur pada tahun 2007 sebanyak (14.71 %) lebih tinggi dari prosentase penduduk miskin Perkotaan rata-rata di Pulau Jawa (11.70 %), Provinsi Banten (6.79 %), DKI Jakarta (4.61 %), DI Yogyakarta (15.63 %), Provinsi Jawa Barat (11.21 %) dan Jawa Tengah (17.23 %). Pada tahun 2019 atau dua belas tahun kemudian, prosentase penduduk miskin Perkotaan di Jawa Timur sebesar (6.84 %) lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin Perkotaan rata-rata di Pulau Jawa (6.76 %), Provinsi Banten (4.12 %), DKI Jakarta (3.47 %) Provinsi Jawa Barat (6.03 %), akan tetapi lebih rendah dari dan Jawa Tengah (9.20 %) dan DI Yogyakarta (10.89 %)

Tabel 7. Prosentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (%) Pedesaan di Pulau Jawa

Provinsi	Pedesaan													Jml	Rata2
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JAWA BARAT	16.88	16.05	14.28	13.88	13.32	12.13	11.42	10.88	11.61	11.72	10.77	10.07	9.79	162.80	12.52
JAWA TENGAH	23.45	21.96	19.89	18.66	17.14	16.55	16.05	15.35	14.86	14.88	13.92	12.8	12.48	217.99	16.77
DI YOGYAKARTA	25.03	24.32	22.6	21.95	21.82	21.29	17.62	16.88	15.62	16.27	15.86	14.71	13.89	247.86	19.07
JAWA TIMUR	25.02	23.64	21	19.74	18.19	16.88	16.23	15.92	15.84	15.83	15.58	15.21	14.43	233.51	17.96
BANTEN	12.52	11.18	10.7	10.44	9.75	8.31	7.22	7.18	7.12	7.32	7.81	7.67	7.49	114.71	8.82
Jumlah	102.90	97.15	88.47	84.67	80.22	75.16	68.54	66.21	65.05	66.02	63.94	60.46	58.08		
Rata - rata	20.58	19.43	17.69	16.93	16.04	15.03	13.71	13.24	13.01	13.20	12.79	12.09	11.62		
Indonesia	20.37	18.93	17.35	16.56	15.72	14.7	14.42	13.76	14.09	14.11	13.93	13.2	12.85		

Pada tabel 7 terlihat bahwa prosentase penduduk miskin Pedesaan di Jawa Timur pada tahun 2007 sebanyak (25.02 %) lebih tinggi dari prosentase penduduk miskin Pedesaan rata-rata di Pulau Jawa (20.58 %), Provinsi Banten (12.52 %), Provinsi Jawa Barat (23.45 %) dan Jawa Tengah (17.23 %), akan tetapi lebih rendah dari DI Yogyakarta (25.03 %). Pada tahun 2019 atau dua belas tahun kemudian, prosentase penduduk miskin Pedesaan di Jawa Timur sebesar (14.43%) lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin Pedesaan rata-rata di Pulau Jawa (12.09%), Provinsi Banten (7.49 %), Provinsi Jawa Barat (9.79 %), Jawa Tengah (12.48%) dan DI Yogyakarta (13.89 %)

Tabel 8. Prosentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (%) Total (Perkotaan + Pedesaan) di Pulau Jawa

Provinsi	Total													Jml	Rata2
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
DKI JAKARTA	4.61	4.29	3.62	3.48	3.75	3.7	3.72	4.09	3.61	3.75	3.78	3.55	3.47	49.42	3.80
JAWA BARAT	13.55	13.01	11.96	11.27	10.65	9.89	9.61	9.18	9.57	8.77	7.83	7.25	6.91	129.45	9.96
JAWA TENGAH	20.43	19.23	17.72	16.56	15.76	14.98	14.44	13.58	13.32	13.19	12.23	11.19	10.8	193.43	14.88
DI YOGYAKARTA	18.99	18.32	17.23	16.83	16.08	15.88	15.03	14.55	13.16	13.1	12.36	11.81	11.7	195.04	15.00
JAWA TIMUR	19.98	18.51	16.68	15.26	14.23	13.08	12.73	12.28	12.28	11.85	11.2	10.85	10.37	179.30	13.79
BANTEN	9.07	8.15	7.64	7.16	6.32	5.71	5.89	5.51	5.75	5.36	5.59	5.25	5.09	82.49	6.35
Jumlah	86.63	81.51	74.85	70.56	66.79	63.24	61.42	59.19	57.69	56.02	52.99	49.90	48.34		
Rata - rata	14.44	13.59	12.48	11.76	11.13	10.54	10.24	9.87	9.62	9.34	8.83	8.32	8.06		
Indonesia	16.58	15.42	14.15	13.33	12.49	11.66	11.47	10.96	11.22	10.86	10.64	9.82	9.41		

ada tabel 8 terlihat bahwa prosentase penduduk miskin total (perkotaan dan pedesaan) di Jawa Timur pada tahun 2007 sebanyak (19.98 %) lebih tinggi dari prosentase penduduk miskin total (perkotaan dan pedesaan) rata-rata di Pulau Jawa (14.44 %), Provinsi Banten (9.07 %), Provinsi Jawa Barat (13.55 %) dan DI Yogyakarta (18.99 %) akan tetapi lebih rendah dari Jawa Tengah (20.43 %).

Pada tahun 2019 atau dua belas tahun kemudian, prosentase penduduk miskin total (perkotaan dan pedesaan) di Jawa Timur sebesar (10.37%) lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin total (perkotaan dan pedesaan) rata-rata di Pulau Jawa (8.06%), Provinsi Banten (5.09 %), Provinsi Jawa Barat (6.91 %), DKI Jakarta (3.47 %), akan tetapi lebih rendah dari Jawa Tengah (10.8%) dan DI Yogyakarta (11.7 %).

4 Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura)-Pantai Selatan Jawa (Pansela) Pulau Jawa, Tahun 2007-2019

Tabel 9. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan jiwa) di Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) Pulau Jawa

	Kabupaten	Tipologi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jml	Rata2
1	TUBAN	Pantura	202.70	196.90	191.10	196.59	198.35	196.10	178.64	1360.38	194.34
2	LAMONGAN	Pantura	197.90	192.00	186.10	182.64	176.92	171.38	164.00	1270.94	181.56
3	GRESIK	Pantura	174.40	171.60	166.90	170.76	167.12	164.08	154.02	1168.88	166.98
4	SITUBONDO	Pantura	94.50	90.30	87.70	91.17	89.68	88.23	80.27	621.85	88.84
5	PROBOLINGGO	Pantura	248.50	238.70	231.90	236.96	240.47	236.72	217.06	1650.31	235.76
6	PASURUAN	Pantura	179.10	175.70	170.70	169.19	168.06	165.64	152.48	1180.87	168.70
7	SIDOARJO	Pantura	130.50	138.20	133.80	136.13	136.79	135.42	125.75	936.59	133.80
Jumlah			1227.60	1203.40	1168.20	1183.44	1177.39	1157.57	1072.22		
Rata - rata			175.37	171.91	166.89	169.06	168.20	165.37	153.17		

Pada tabel 9 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir pantai Utara Jawa (Pantura) Jawa Timur pada tahun 2012 sebanyak 1.227.600 jiwa, dengan rata-rata jumlah penduduk miskin sebanyak 175.370 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 1.183.440 jiwa dengan rata-rata jumlah penduduk miskin sebanyak 169.060 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 1.072.220 jiwa dengan rata-rata jumlah penduduk miskin sebanyak 153.170 jiwa.

Tabel10. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan jiwa) di Wilayah Pantai Selatan Jawa (Pansela) di Pulau Jawa

	Kabupaten	Tipologi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jml	Rata2
1	PACITAN	Pansela	94.50	91.70	88.90	92.08	85.53	85.26	78.64	616.61	88.09
2	TRENGGALEK	Pansela	96.90	92.80	90.00	92.17	91.49	89.77	83.50	636.63	90.95
3	TULUNGAGUNG	Pansela	94.60	91.70	89.00	87.37	84.35	82.80	75.23	605.05	86.44
4	BLITAR	Pansela	121.60	120.30	116.70	114.12	113.51	112.93	112.40	811.56	115.94
5	KEDIRI	Pansela	209.00	202.70	196.80	199.38	197.43	191.08	177.20	1373.59	196.23
6	MALANG	Pansela	275.50	288.60	280.30	292.87	293.74	283.96	268.49	1983.46	283.35
7	LUMAJANG	Pansela	126.40	124.40	120.70	118.51	115.91	112.65	103.69	822.26	117.47
8	JEMBER	Pansela	280.00	278.50	270.40	269.54	265.10	266.90	243.42	1873.86	267.69
9	BANYUWANGI	Pansela	157.20	152.20	147.70	146.00	140.45	138.54	125.50	1007.59	143.94
Jumlah			1455.70	1442.90	1400.50	1412.04	1387.51	1363.89	1268.07		
Rata - rata			161.74	160.32	155.61	156.89	154.17	151.54	140.90		

Pada tabel 10 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir pantai Selatan Jawa (Pansela) Jawa Timur pada tahun 2012 sebanyak 1.455.700 jiwa, dengan rata-rata jumlah penduduk miskin sebanyak 161.740 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 1.412.040 jiwa dengan rata-rata jumlah penduduk miskin sebanyak 156.890 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 1.268.070 jiwa dengan rata-rata jumlah penduduk miskin sebanyak 140.900 jiwa.

5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura)-Pantai Selatan Jawa (Pansela) Pulau Jawa, Tahun 2007-2019

Tabel 11. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) di Pulau Jawa

	Kabupaten	Tipologi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jml	Rata2
1	TUBAN	Pantura	2.55	2.83	2.48	2.98	3.03	3.29	2.55	19.71	2.82
2	LAMONGAN	Pantura	1.92	2.00	2.40	2.25	2.40	2.53	2.83	16.33	2.33
3	GRESIK	Pantura	2.48	2.46	2.36	2.58	2.19	2.51	1.79	16.37	2.34
4	SITUBONDO	Pantura	2.35	2.09	2.59	2.25	1.79	1.77	1.49	14.33	2.05
5	PROBOLINGGO	Pantura	3.43	3.35	3.09	3.58	3.24	3.34	3.42	23.45	3.35
6	PASURUAN	Pantura	1.56	1.79	1.68	1.43	1.56	1.67	1.50	11.19	1.60
7	SIDOARJO	Pantura	0.80	0.93	0.76	0.77	0.95	1.05	1.03	6.29	0.90
Jumlah			15.09	15.45	15.36	15.84	15.16	16.16	14.61		
Rata - rata			2.16	2.21	2.19	2.26	2.17	2.31	2.09		

Pada tabel 11 terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di wilayah pesisir pantai Utara Jawa (Pantura) Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar 15,09, dengan rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,16. Pada tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 15,84 dengan rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,26. Pada tahun 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 14,61 dengan rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,09.

Tabel 12. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Wilayah Pantai Selatan Jawa (Pansela) di Pulau Jawa

	Kabupaten	Tipologi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jml	Rata2
1	PACITAN	Pansela	2.12	2.50	2.43	2.92	2.86	2.14	1.73	16.70	2.39
2	TRENGGALEK	Pansela	1.88	1.76	1.98	2.18	1.74	1.71	1.85	13.10	1.87
3	TULUNGAGUNG	Pansela	1.07	1.15	1.11	1.27	0.98	0.82	0.98	7.38	1.05
4	BLITAR	Pansela	1.57	1.68	1.21	1.61	1.53	1.16	1.33	10.09	1.44
5	KEDIRI	Pansela	1.73	1.96	2.07	2.05	1.66	1.75	1.71	12.93	1.85
6	MALANG	Pansela	1.33	1.69	1.71	2.05	1.57	1.83	1.67	11.85	1.69
7	LUMAJANG	Pansela	1.73	1.17	1.68	1.65	1.62	1.60	1.38	10.83	1.55
8	JEMBER	Pansela	1.60	1.25	1.47	1.58	1.33	1.33	1.45	10.01	1.43
9	BANYUWANGI	Pansela	1.31	1.55	1.27	1.02	1.41	1.15	1.40	9.11	1.30
Jumlah			14.34	14.71	14.93	16.33	14.70	13.49	13.50		
Rata - rata			1.59	1.63	1.66	1.81	1.63	1.50	1.50		

Pada tabel 12 terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di wilayah pesisir pantai Selatan Jawa (Pansela) Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar 14,34, dengan rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,59. Pada tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 16,33 dengan rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,81. Pada tahun 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 13,50 dengan rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,50.

5. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura)-Pantai Selatan Jawa (Pansela) Pulau Jawa, Tahun 2007-2019

Tabel 13. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) di Pulau Jawa

	Kabupaten	Tipologi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jml	Rata2
1	TUBAN	Pantura	0.56	0.71	0.60	0.79	0.82	0.91	0.65	5.04	0.72
2	LAMONGAN	Pantura	0.36	0.40	0.55	0.58	0.66	0.66	0.86	4.07	0.58
3	GRESIK	Pantura	0.59	0.72	0.66	0.67	0.56	0.71	0.45	4.36	0.62
4	SITUBONDO	Pantura	0.56	0.51	0.76	0.59	0.39	0.38	0.31	3.50	0.50
5	PROBOLINGGO	Pantura	0.81	0.81	0.74	0.97	0.80	0.84	0.91	5.88	0.84
6	PASURUAN	Pantura	0.31	0.45	0.46	0.31	0.33	0.44	0.37	2.67	0.38
7	SIDOARJO	Pantura	0.14	0.22	0.15	0.14	0.23	0.25	0.31	1.44	0.21
Jumlah			3.33	3.82	3.92	4.05	3.79	4.19	3.86		
Rata - rata			0.48	0.55	0.56	0.58	0.54	0.60	0.55		

Pada tabel 13 terlihat bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah pesisir pantai Utara Jawa (Pantura) Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar 3,3, dengan rata-rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,48. Pada tahun 2015 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 4,05 dengan rata-rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,58. Pada tahun 2018 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 3,86 dengan rata-rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,55.

Tabel 14. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Wilayah Pantai Selatan Jawa (Pansela) di Pulau Jawa

	Kabupaten	Tipologi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jml	Rata2
1	PACITAN	Pansela	0.42	0.55	0.54	0.90	0.79	0.48	0.32	4.00	0.57
2	TRENGGALEK	Pansela	0.42	0.35	0.44	0.59	0.37	0.40	0.42	2.99	0.43
3	TULUNGAGUNG	Pansela	0.20	0.24	0.24	0.30	0.18	0.16	0.21	1.53	0.22
4	BLITAR	Pansela	0.35	0.38	0.23	0.38	0.35	0.22	0.28	2.19	0.31
5	KEDIRI	Pansela	0.34	0.43	0.49	0.45	0.37	0.39	0.39	2.86	0.41
6	MALANG	Pansela	0.25	0.43	0.40	0.55	0.33	0.43	0.39	2.78	0.40
7	LUMAJANG	Pansela	0.38	0.18	0.41	0.41	0.35	0.37	0.31	2.41	0.34
8	JEMBER	Pansela	0.34	0.22	0.31	0.33	0.29	0.28	0.33	2.10	0.30
9	BANYUWANGI	Pansela	0.29	0.37	0.25	0.20	0.34	0.24	0.35	2.04	0.29
Jumlah			2.99	3.15	3.31	4.11	3.37	2.97	3.00		
Rata - rata			0.33	0.35	0.37	0.46	0.37	0.33	0.33		

Pada tabel 14 terlihat bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah pesisir pantai Selatan Jawa (Pansela) Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar 2,99, dengan rata-rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,33. Pada tahun 2015 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 4,11 dengan rata-rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,46. Pada tahun 2018 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 3,00 dengan rata-rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,33.

BAB 5. KESIMPULAN

Dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan garis kemiskinan perkotaan di Jawa Timur lebih rendah dari garis kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa, untuk pedesaan di Jawa Timur lebih tinggi dari garis kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa
2. Jumlah dan prosentase penduduk miskin perkotaan di Jawa Timur lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin perkotaan rata-rata di Pulau Jawa, begitu juga dengan pedesaan.
3. Keragaan jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) lebih rendah dari pada di wilayah pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur
4. Keragaan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan bersifat fluktuatif, pada tahun 2012 wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) lebih tinggi dari pada wilayah pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur, tahun 2015 wilayah pantai Utara (Pantura) Jawa Timur lebih rendah dan pada tahun 2018 lebih tinggi kembali.
5. Keragaan perkembangan indeks keparahan kemiskinan juga bersifat fluktuatif, pada tahun 2012 wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) lebih tinggi dari pada wilayah pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur, tahun 2015 wilayah pantai Utara (Pantura) Jawa Timur lebih rendah dan pada tahun 2018 lebih tinggi kembali.

REFERENSI

- [1] Benazir and Azharsyah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Pidie Jaya,” pp. 1–80, 2017.
- [2] J. Y. Eka Ramadhansyah, Fajar Restuhadi, “Profil Sosial Eekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2012,” vol. 5, pp. 124–136, 2014.
- [3] Sugiyarto, J. H. Mulyo, and R. N. Seleky, “Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro,” *J. Agro Ekon.*, vol. 26, no. 2, pp. 115–120, 2015.
- [4] N. M. I. Dariwardani, “Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) Di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008 – 2010,” *J. Ekon. Kuantitatif Terap.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–1, 2014.
- [5] T. Waas, J. Hugé, T. Block, T. Wright, F. Benitez-Capistros, and A. Verbruggen, “Sustainability assessment and indicators: Tools in a decision-making strategy for sustainable development,” *Sustain.*, vol. 6, no. 9, pp. 5512–5534, 2014.
- [6] M. Firdaus, T. Apriliani, and R. A. Wijaya, “PENGELUARAN RUMAH TANGGA NELAYAN DAN KAITANNYA DENGAN KEMISKINAN: Kasus di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang, Jawa Timur,” *J. Sos. Ekon. Kelaut. dan Perikan.*, vol. 8, no. 1, p. 49, 2017.
- [7] B. P. S. (BPS) K. Surabaya, “Profil Kemiskinan di Indonesia Bulan Maret Tahun 2018,” no. 5, pp. 1–9, 2018.
- [8] L. Masnidar Nasution, “STATISTIK DESKRIPTIF Leni Masnidar Nasution,” *J. Hikmah*, vol. 14, no. 1, pp. 49–55, 2017.
- [9] Rachmaniar and R. Anita, “STUDI DESKRIPTIF TENTANG LOYALITAS PESERTA GRUP WHATSAPP Prodi Hubungan Masyarakat , Fakultas Ilmu Komunikasi , Universitas Padjadjaran,” vol. 2, no. November, pp. 32–39, 2017.